

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Talib Mustafa, Agus. (2017). *Kemitraan Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Calpulis.

Jurnal

- Dwiyanto, Agus. (2010). "*Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif dan Kolaborasi*". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ershanty, Devita. dkk. (2020). "*Kemitraan Dinas Sosial Provinsi Lampung Dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda Dalam Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas*". *Jurnal Administrativa*. Volume 2, No 2. Lampung: Universitas Lampung.
- Fatmawati. (2011). "*Kemitraan Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Penjelajahan Teoritik*". *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume 1, No. 2. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Freitas, Jose Maria Da Conceicao. (2014). "*Kemitraan Pemerintah Dan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Pantai Utara Kota Surabaya*". *JKMP*. Volume 2, No 2. Surabaya: Universitas Dr. Soetomo.
- Kurniawan, Fandy. dkk. (2013). "*Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Pada Tirta Wisata Kabupaten Jombang)*". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Volume 1, No 1. Malang: Universitas Brawijaya.
- KPPPA, Laporan Beijing Platform for Action (BPfA) +25. (2014). *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*.
- Melyanti, Imelda. (2014). "*Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society, dan Swasta Dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo. Kebijakan dan Manajemen Publik*". Volume 2, No 1. Surabaya: Universitas Airlangga.
- PBB, Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Declaration on the Elimination of Violence Against Women). (1993). *Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa*.
- Rudi, dkk. (2017). "*Kemitraan Pemerintah Dengan Asita Dalam Promosi Kunjungan Wisata Di Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Administrasi Publik*". Volume 3, No 1. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Seran, Gotfridus Goris, dkk. (2021). "*Exploring Key Elements of Public Governance*". *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research* (IJSBAR), 56(1), 92-103. Bogor: Universitas Djuanda.
- Yusdiyanto. (2012). "*Kontruksi Kerjasama LSM dan Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah Perspektif Undang-Undang Keormasan*". *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 6, No. 2. Lampung: Universitas Lampung.

Yulian Fahmy, Amri. dkk. (2013). “Pelaksanaan Program Kemitraan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (Studi Pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Volume 1, No.6. Malang: Universitas Brawijaya.

Dokumen

DPMPPA, LKIP. (2021). *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor*.

Hukum

Indonesia. *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat*.

Indonesia. *Keputusan Presiden No.181 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan*.

Indonesia. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial*.

Indonesia. *Peraturan Presiden No.65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*.

Indonesia. *Peraturan Daerah Kota Bogor No.7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor*

Indonesia. *Peraturan Daerah Kota Bogor No.3 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor No.7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor*.

Indonesia. *Peraturan Wali Kota Bogor No.69 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan DP3A*.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT*.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.

Internet

<https://dpppa.kotabogor.go.id>.

<https://bogor-kita.com/polink-gaul-aplikasi-konsultasi-masalah-keluarga-perempuan-dan-anak-kota-bogor>. (2022,03,0202).